



Kajian Kebijakan Anggaran Pertahanan Nasional terhadap Perekonomian Indonesia

Review of National Defense Budget Policy to the Indonesian Economy

Posma Sariguna Johnson Kennedy
posmahutasoit@gmail.com

Suzanna Josephine L. Tobing
tobing_josephine@yahoo.com

Rutman Lumbantoruan
rutman.toruan@uki.ac.id

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract

In building the power of the nation, there are two main factors that must be considered, namely economic and defense factors. The ups and downs of the defense budget generally have an impact on the national economy, while the economy and defense are the main components in building the strength of a nation. The general objective from this research is to look at the picture of the effect of the threat level of Indonesia's strategic environment on defense budget policy and its effect on the national economy. From the study show that the effect of the defense budget on the economy is still very small. But indirectly, it can still keep the demand and production process, and eliminate potential threats to disturbances on aggregate demand and supply, although the potential threat from the strategic environment shows an upward trend. Increased defense budgets do not lead to a reduction in other welfare budgets such as the education budget. However, increased threats must be considered because the education process can be disrupted. Therefore, the determination of defense budget, education budget, and other welfare budget must be taken into account in a balanced manner so as to give effect of low cost opportunity.

Keywords: *economy, defense, defense budget policy.*

1. Pendahuluan

Dalam mencapai tujuannya, setiap negara akan selalu menjaga kedaulatan wilayahnya dengan pertahanan yang kuat untuk menangkal gangguan-gangguan dari negara-negara di sekitarnya. Dengan adanya perubahan yang demikian cepat dan jumlah penduduk dunia terus bertambah, tentunya perebutan wilayah-wilayah ekonomi juga sering terjadi. Perebutan wilayah perbatasan dengan motif utama penguasaan sumber daya alam baik yang terbarukan (*renewable resources*) maupun tak terbarukan (*non-renewable resources*) perlu diwaspadai. Jika wilayah kedaulatan negara diganggu oleh negara-negara tetangga, maka keberadaan dan kehormatan suatu bangsa mengalami ancaman. Stabilitas keamanan lingkungan strategis sudah seharusnya menjadi bagian dari kepentingan nasional, sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian kawasan dan stabilitas regionalnya.

Ancaman ini merupakan ancaman tradisional yang memiliki karakteristik khusus bahwa ancaman berasal dari luar negara, dengan aktor-aktor yang memberikan ancaman adalah suatu negara, sehingga memerlukan persenjataan berat dan modern untuk menghadapinya. Menurut pengertian

tradisional, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain untuk menghadapi berbagai ancaman. Potensi ancaman tidaklah ringan dimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat.

Alokasi anggaran pertahanan merupakan elemen yang paling penting sebagai salah satu unsur yang menentukan kapabilitas militer suatu negara dalam menghadapi ancaman di lingkungan strategisnya. Negara dengan belanja militer lebih besar atau di atas rata-rata normal memiliki indikasi kekuatan militer yang besar. Negara yang memiliki indikasi kekuatan persenjataan yang besar tentunya akan terlihat lebih mengancam dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki alokasi pertahanan yang relatif lebih kecil. Anggaran untuk pertahanan nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang cukup penting. Sampai sejauh ini terdapat dua argumen yang berkembang mengenai kebijakan pengeluaran pertahanan yaitu, pengeluaran pemerintah ini dapat saja memberikan efek negatif atau positif pada perekonomian.

Kebijakan anggaran pertahanan yang tidak efisien akanlah sia-sia pada tingkat ancaman berapapun, karena akan memberikan efek depresi pada perekonomian. Dengan demikian melalui penelitian ini, hasilnya seyogyanya dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan anggaran dengan program-program pertahanan nasional yang lebih efisien sehingga terbentuk kekuatan pertahanan yang efektif.

Perlu adanya pertahanan nasional yang kuat sehingga akan mendorong investasi masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Terdapat hubungan antara tingkat keamanan dan perekonomian dalam suatu negara. Dalam kenyataannya, Indonesia belum memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai peralatan yang memadai dan berteknologi tinggi, karena itu perlu mempertahankan dan memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi seluruh ancaman.

Keseimbangan kekuatan antara Indonesia dengan negara-negara perbatasan diduga mulai berubah tercermin dengan strategi anggaran pertahanan mereka di kawasan regional. Peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini, apakah dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Penelitian ini akan melihat: "Apakah pengaruh kebijakan anggaran pertahanan nasional terhadap perekonomian Indonesia". Dari keseluruhan hasil pengujian akan dianalisa dan menjadi suatu temuan yang dapat dikembangkan secara lebih mendalam untuk kebijakan perencanaan pertahanan nasional yang lebih baik.

2. Kerangka Teoritis

Terdapat dua unsur fisik mendasar dalam membangun kekuatan bangsa, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan. Artinya, jika tidak memiliki ekonomi dan pertahanan yang kuat, maka kekuatan negara akan menjadi lemah. Jumlah anggaran pertahanan tentunya ditentukan oleh besar PDB, akibatnya tingkat ekonomi menjadi faktor yang menentukan di balik kekuatan pertahanan. Tetapi sebaliknya, dengan memiliki angkatan perang yang kuat sekiranya dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Naik turunnya anggaran pertahanan secara umum memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, sedangkan ekonomi dan pertahanan merupakan komponen utama dalam membangun kekuatan suatu bangsa. (Rahakundini, 2007)

Dalam menjelaskan perekonomian suatu negara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sangatlah kompleks. Banyak variabel yang terlibat dan berpengaruh di dalamnya, baik yang paling dominan, sangat kecil pengaruhnya, atau tidak berpengaruh sama sekali. Besaran anggaran pertahanan diduga termasuk memiliki pengaruh kecil, namun tetap harus dilihat pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Anggaran pertahanan dan perekonomian merupakan dua variabel yang saling

timbang balik. Tanpa pertahanan maka akan muncul ancaman atau gangguan-gangguan sehingga perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya anggaran pertahanan hanya dapat ditingkatkan jika pendapatan nasional juga meningkat.

Salah satu pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pertahanan dan perekonomian dari sisi penawaran adalah dengan pendekatan fungsi produksi dari neoklasik. Yaitu dengan meninjau deskripsi dari sisi penawaran melalui perubahan-perubahan *aggregat output*. West & Thompson (1990) menyatakan, akibat adanya pengeluaran pertahanan maka muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada *agreat output* dari sisi penawaran, dapat dijelaskan melalui teori neoklasik berikut ini :

- Jika muncul efek alokasi sumber-sumber daya (*resource-allocation effect*) yang menyebabkan investasi menjadi *crowd-out*, akan terjadi penurunan pertumbuhan *output* agregat. Model neoklasik menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan merupakan fungsi dari pertumbuhan modal. Jadi ketika muncul efek ini, transmisi yang terjadi akan menurunkan pertumbuhan modal dan dilanjutkan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan *output* agregat.
- Munculnya efek mobilisasi sumber-sumber daya (*resource-mobilization effect*) akan berdampak pada turunnya tabungan dari rumah tangga. Sesuai dengan model neoklasik, tentunya turunnya tabungan akan memperendah pergerakan tingkat pertumbuhan.
- Jika terjadi *spin-off effect* pada sektor-sektor lain dari peningkatan teknologi, maka sesuai model neoklasik, peningkatan teknologi yang terjadi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- Terjadinya *aggregate demand effect* dengan adanya mekanisme pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian tidak dapat dijelaskan dalam teori neoklasik. Pada model ini tidak mungkin terjadi, karena sumber-sumber daya perekonomian diasumsikan *full employment*.
- Jika terjadi *debt accumulation effect*, maka produk atau jasa berteknologi tinggi yang dibeli dengan utang luar negeri tanpa melakukan transfer teknologi akan memperendah pertumbuhan teknologi. Dalam model neoklasik, rendahnya pertumbuhan ini karena akses kepada teknologi asing sangat terbatas.

Saluran yang dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran militer terhadap *output* perekonomian melalui sisi permintaan adalah melalui level dan komposisi dari *expenditure*. Yang terjadi di sini adalah adanya efek pengganda sehingga meningkatkan permintaan (*Keynesian multiplier effect*). Peningkatan ini akan meningkatkan utilitas dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Benoit (1973, 1978) pengeluaran untuk militer dapat memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, efek ini berasal dari model Keynes berdasarkan mekanisme pengganda bagi negara-negara yang *underutilized*. West & Thompson (1990) juga menyatakan bahwa akibat adanya pengeluaran pertahanan maka muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada *output* agregat dari sisi permintaan, yang dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Keynes, yaitu :

- Jika muncul efek alokasi sumber-sumber daya (*resource-allocation effect*) akan menyebabkan investasi menjadi *crowd-out*. Model Keynes menjelaskan bahwa pertumbuhan melambat pada tahun-tahun selanjutnya. Misalnya jika sektor pertanian melambat di belakang sektor industri karena pengeluaran militer menekan investasi pada pertanian, tingkat pertumbuhan juga akan melambat.
- Munculnya efek mobilisasi sumber-sumber daya (*resource-mobilization effect*) akan berdampak pada turunnya tabungan dari *household*. Menurut model Keynes, rendahnya tingkat rasio tabungan menjadi sebab rendahnya pergerakan tingkat pertumbuhan.
- Jika terdapat *spin-off* yang positif dari pengeluaran militer, sesuai model Keynes, akan terjadi peningkatan pertumbuhan.
- *Aggregate demand effect* yang muncul, tentunya dapat dijelaskan oleh model Keynes berdasarkan mekanisme pengganda (*multiplier mechanism*). Efek multiplier ini statis, tetapi dapat saja berefek dinamis dalam jangka panjang.

- Jika terjadi *debt accumulation effect* akan menekan pertumbuhan modal. Dalam model Keynes, efek ini mengakibatkan pengurangan sumber-sumber daya untuk pertukaran dengan luar negeri.

Hartley (2005) mengidentifikasi pengaruh positif dari pengeluaran pertahanan. Pertahanan memberikan keuntungan secara langsung dari teknologi dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, dimana *spin-off*-nya digunakan oleh sektor sipil yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Di negara-negara berkembang, pengeluaran pertahanan dapat meningkatkan pertumbuhan jika beberapa bagian pengeluaran digunakan untuk penyediaan infrastruktur sosial. Pengeluaran pertahanan menyediakan perlindungan bagi warga negara, dimana keamanan internal dan eksternal akan meningkatkan pertukaran dalam pasar.

Dengan disadari variasi yang terlalu besar dari tingkat ancaman akan menekan pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan pengeluaran pertahanan untuk mengeliminirnya. Para aktor penentu kebijakan menjadikan tingkat ancaman sebagai dasar dalam menentukan besaran anggaran pertahanan. Walaupun hubungan antar negara saat ini sudah *borderless*, namun secara tegas perlu dijaga kedaulatan suatu negara dari ancaman tradisional yang berasal dari negara lain.

Tingkat ancaman dalam penelitian ini difokuskan pada ancaman tradisional, dimana aktor atau pelakunya adalah negara-negara. Walaupun Indonesia tidaklah memiliki musuh tradisional dan ancaman non-tradisional/internal juga merupakan hal yang penting, namun ketidakwaspadaan atau lengah terhadap ancaman tradisional/eksternal dapat sangat membahayakan. Bahkan pertahanan yang lemah bisa menjadi pintu masuk terjadinya konflik-konflik internal akibat pengaruh asing. Dengan lemahnya pertahanan akan berakibat juga terhadap berkurangnya wibawa negara di percaturan internasional, diplomasi-diplomasi yang dilakukan untuk kepentingan negara juga tidak memiliki daya tekan yang kuat. Selain itu dominasi, pelanggaran, infiltrasi asing dan lain-lain dengan mudah masuk ke dalam negara karena lemahnya daya gentar. Untuk menghadapi ancaman itu semua, negara tidak boleh berharap dari bantuan negara lain, tetapi harus berdasar pada kekuatan sendiri, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pengeluaran pertahanan.

Besaran ancaman sangat sensitif dengan keberadaan kekuatan dari setiap negara relatif dengan kekuatan negara-negara tetangganya. Besaran ini mengasumsikan semakin besar kapabilitas relatif suatu negara (*nation's relative capability*), semakin besar pula pengaruh politik dan militernya terhadap lingkungan strategisnya. Distribusi kapabilitas ini asimetrik diantara negara-negara sehingga membentuk ancaman dan tekanan di antara mereka.

Indonesia memiliki posisi yang strategis dan merupakan jalur lalu lintas dunia yang sangat penting. Terletak diantara benua Asia dan Australia, serta Lautan Pasifik dan Lautan India. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 1.919.440 km² terdiri dari 17.504 buah pulau besar dan kecil, memiliki sekitar 81.900 km garis pantai, serta 75 persen (5,8 juta km²) wilayahnya berupa laut. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, baik darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan dan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Kawasan-kawasan perbatasan wilayah laut Indonesia umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau. Diantara 92 pulau tersebut terdapat 12 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut merupakan titik terluar yang mempengaruhi luas wilayah teritorial Indonesia dan berpotensi menjadi konflik teritorial dengan negara tetangga.

Secara klasik keseimbangan distribusi kekuatan atau *balance of power* sangat dipengaruhi paling besar oleh kekuatan militer suatu negara baik jumlah tentara, jumlah persenjataan maupun teknologi yang tercermin pada anggaran militernya. Akan tetapi Virmani (2004) menyatakan bahwa semenjak selesainya Perang Dunia II, dunia berubah secara dramatis, sehingga konsep "*balance of power*" secara gradual berubah menjadi "*natural balance of power*" dimana besaran ekonomi menjadi dasarnya. *Balance of power* ini juga akan disebut "*stable balance*" jika menunjukkan *natural balance*. Chatterjee (1972)

Natural balance of power ini merupakan cita-cita perdamaian bangsa di dunia yang hingga kini masih terus akan diusahakan perwujudannya. *Natural balance of power* didefinisikan sebagai sikap bertanggung jawab suatu negara dalam meningkatkan kekuatan potensial relatifnya secara proporsional dengan memperhatikan internasionalisasi dan hak-hak global. Sistem yang dibangun diharapkan mampu menciptakan kompetisi ekonomi yang damai antar negara. Di dalam negaranya sendiri tidak terjadi kompetisi antar dimensi, baik ekonomi dan militer.

Perbedaan keseimbangan kekuatan antar negara dapat memberikan persepsi ancaman bagi yang lebih lemah. Lebovic & Ishaq (1987) mendefinisikan situasi mengancam adalah terjadinya distribusi kekuatan yang asimetris antar negara yang menciptakan suatu kondisi mengancam (*threat*) dan ketegangan (*tension*) atau eskalasi diantara mereka. Dengan demikian situasi mengancam ini dapat diekspresikan sebagai konsep kekuatan relatif. Namun bentuk asimetris kekuatan ini dilihat dari sudut pandang berbeda-beda tergantung motif apa yang melandasi kondisi ini. Dari persepsi ini maka suatu negara membuat kebijakan pengeluaran pertahanan mereka.

Penelitian ini akan menganalisa pengaruh kebijakan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan nasional terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kajian ekonomi pertahanan yang masih baru dalam literatur di Indonesia.. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk pembangunan pertahanan Indonesia. Dari keseluruhan hasil pengujian akan dianalisa dan menjadi suatu temuan yang dapat dikembangkan secara lebih mendalam untuk kebijakan perencanaan anggaran pertahanan nasional yang lebih baik

Subyek utama penelitian ini adalah Indonesia. Pertahanan nasional berkonotasi terhadap kemampuan negara menghadapi ancaman tradisionalnya yang berasal dari luar, karena itu ancaman yang dihadapi Indonesia dibatasi sebagai ancaman eksternal, dimana aktor yang mengancam adalah Negara lain. Negara-negara yang mengancam dibatasi berasal dari lingkungan strategis Indonesia, yaitu negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Papua Nugini, Republik Palau, Australia, dan India.

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan melakukan pengumpulan data, menginventarisasikan, mengolah sampai menyajikan hasil interpretasi, serta memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti. Untuk melihat pengaruh anggaran pertahanan terhadap perekonomian, akan dilihat temuan dari penelitian terhadap pengaruh antara pengeluaran pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi, pengaruh dengan investasi, pengaruh dengan pendidikan. Dari temuan tersebut, diindikasikan terdapat sistem simultan dari keempat variabel. Pengaruh anggaran pertahanan ditetapkan sebagai otonomus untuk dapat melihat efek pengganda secara silang terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi dan anggaran pendidikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum melihat pengaruh kebijakan pertahanan melalui anggaran militer terhadap pertumbuhan ekonomi, kita harus mengetahui tingkat ancaman (ancaman eksternal/tradisional) terhadap perekonomian.

A. Tingkat Ancaman Indonesia¹

Setiap negara berhadapan dengan negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, sehingga perlu dihitung kapabilitas relatifnya terhadap negara-negara di lingkungan strategisnya. Model ancaman tradisional yang cocok untuk situasi Indonesia yang tidak dalam keadaan perang, adalah memandang ancaman tersebut sebagai ancaman potensial atau laten. Perhitungan tingkat ancaman ini tidak saja melihat kekuatan militer dari lingkungan strategis, tetapi juga melihat kapabilitas ekonomi negara tetangga yang dapat dihitung secara fisik.

Dengan data *Global Military Indeks* (GMI) dapat diproksi suatu indeks kapabilitas relatif yang dimiliki suatu negara. GMI merupakan indeks yang menggambarkan kapasitas kekuatan persenjataan atau tingkat militerisasi terhadap kecenderungan peningkatan atau penurunan persenjataan dalam suatu negara. Militerisasi merupakan kebijakan dari suatu negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan meningkatkan kekuatan nasional yang diarahkan melalui pembangunan kekuatan militer. Indeks ini diterbitkan *Bonn International Centre for Conversion* (BICC, Jerman). GMI inilah yang digunakan sebagai kapabilitas militer dalam penelitian ini untuk menghitung ancaman eksternal dari negara-negara lain. Berdasarkan metode perhitungan kapabilitas relatif dari Lebovici & Ishaq (1987), dibentuk suatu indeks *relative capability* (RC) dari setiap negara yang berbatasan dengan Indonesia. RC dari masing-masing negara di lingkungan strategis Indonesia dapat dilihat dari diagram di atas. Dari kapabilitas relatif tiap negara ini, dapat dibentuk indeks ancaman suatu negara atau *security need index* (SNI).

Di era Orde Baru, Indonesia relatif aman dari ancaman eksternal, namun sejak tahun 1995 tingkat ancaman Indonesia meningkat. Bahkan di tahun 1998-1999 pada puncak krisis moneter, kekuatan negara-negara di lingkungan strategis lebih besar daripada kekuatan militer Indonesia. Saat itu pemerintah masih fokus pada program krisis. Hal ini menyebabkan program pertahanan nasional menurun. Berdasarkan ancaman eksternal/tradisional, indeks kebutuhan keamanan Indonesia dari negara-negara di lingkungan strategis menunjukkan tren yang meningkat. Sejak tahun 2002, negara-negara di lingkungan strategis Indonesia telah meningkatkan tingkat militerisasi mereka. Ancaman tradisional menjadi masalah bagi Indonesia dan harus dihadapi.

B. Pengaruh Anggaran Pertahanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi²

Dari model tunggal yang dibangun ternyata belanja militer memberikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ancaman tradisional tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi pada periode lalu. Namun interaksi anggaran pertahanan dan ancaman memberi dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode lalu. Dari hasil tersebut, dapat digambarkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia memberi dampak pada ekonomi nasional melalui pertumbuhan ekonomi.

Anggaran pertahanan belum cukup besar sehingga tidak mempengaruhi mobilisasi dan alokasi sumber daya. Ancaman tradisional tidak banyak variasi, sehingga produksi bisa meningkat, proses penawaran dan permintaan tidak terganggu, dan pelaku ekonomi masih merasa aman. Investasi masih berjalan dengan baik dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investor masih merasa bahwa kebijakan di sektor pertahanan masih menjamin keamanan untuk berinvestasi di Indonesia.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pertahanan nasional yang ada, secara keseluruhan masih meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber daya dalam negeri. Sebagai perbandingan, Deger & Smith (1983) menganalisis 50 negara berkembang yang menggunakan data dari tahun 1965 sampai 1973. Ditemukan bahwa anggaran militer hanya memberi sedikit pengaruh

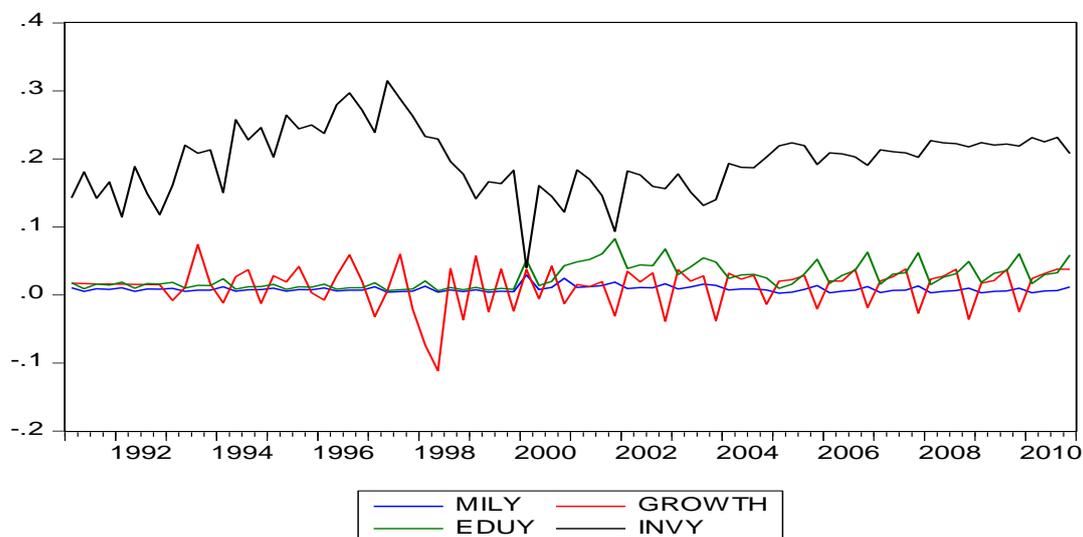
¹ Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2017). The Level of Traditional Threats of Indonesia's Defense Budget on Natural Balance of Power, *Program Book ICoCSPA September 2017 "Development and Security in Risk Society"*, Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University.

² Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2017). Financing Defence: The Influence of Defence Budget to National Economics in Indonesian Case", *Proceeding of International Conference on Management, Accounting, Business and Entrepreneurship* (ICMABE-2017), IPMI International Business School.

positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak negatif terhadap investasi yang lebih besar. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kennedy (2016), menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan anggaran pertahanan dan perubahan non-pertahanan menyebabkan efek *crowding out* pada investasi. Semua hasil empiris tersebut saling melengkapi.

C. Pengaruh Anggaran Pertahanan terhadap Perekonomian

Peneliti membangun persamaan untuk menguji dugaan bahwa pengeluaran pertahanan akan mempengaruhi investasi dan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, dan secara simultan variabel-variabel tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terdapat dugaan bahwa pengeluaran pertahanan yang *autonomous* berpengaruh terhadap perekonomian secara simultan. Data yang digunakan adalah data-data kuartilan pada periode tahun 1991 (kuartil pertama) sampai dengan tahun 2010 (kuartil keempat) sebanyak 80 data observasi, berupa besaran pertumbuhan ekonomi, investasi/pdb, anggaran pertahanan/pdb dan anggaran pendidikan/pdb.



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Riil
dari Anggaran Pertahanan/PDB (*MILY*), Investasi Swasta/PDB (*INVY*)
dan Anggaran Pendidikan/PDB (*EDUY*) Periode 1991-2010
Sumber : hasil pengolahan data

Dari pergerakan data memberi dugaan bahwa terdapat pengaruh kebijakan anggaran pertahanan terhadap perekonomian. Dengan dugaan awal sebagai berikut:

- Investasi dan anggaran pendidikan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
- Pengeluaran militer memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan tingkat ancaman eksternal tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan ancaman diringi dengan peningkatan anggaran pertahanan.
- Peningkatan anggaran pemerintah berpengaruh terhadap besaran anggaran pertahanan.
- Anggaran pertahanan belum cukup untuk mengawal seluruh warga Indonesia secara absolut.
- Anggaran pertahanan menunjukkan penambahan anggaran pertahanan dapat menurunkan investasi.
- Peningkatan ancaman berpengaruh terhadap investasi

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan anggaran pendidikan, demikian pula sebaliknya.
- Anggaran pertahanan tidak menyebabkan penurunan anggaran pendidikan
- Tingkat ancaman eksternal berpengaruh terhadap anggaran pendidikan.
- Kenaikan tingkat ancaman tidak menurunkan anggaran pendidikan, demikian pula sebaliknya.
- Walaupun tingkat ancaman berpengaruh, namun interaksinya dengan variabel pertahanan memberikan pengaruh positif terhadap anggaran pendidikan.

Pernyataan di atas menggambarkan anggaran pertahanan Indonesia berpengaruh terhadap perekonomian. Anggaran pertahanan nasional menekan pertumbuhan ekonomi dan memberikan efek *crowding out* dengan investasi tetapi tidak sensitif.

5. Kesimpulan

Dari kajian menunjukkan bahwa pengaruh anggaran pertahanan terhadap perekonomian masih sangat kecil. Namun secara tidak langsung dapat menjaga berlangsungnya proses permintaan dan produksi, serta mengeliminir ancaman potensial terhadap gangguan-gangguan pada permintaan dan penawaran agregat, walaupun potensi ancaman dari lingkungan strategis juga menunjukkan tren meningkat.

Disadari terdapat pengaruh anggaran pertahanan terhadap perekonomian. Namun, kebijakan anggaran yang tidak efisien akanlah sia-sia pada tingkat ancaman berapapun, karena akan memberikan efek depresi pada perekonomian. Dalam penetapan anggaran pertahanan, anggaran pendidikan, dan anggaran kesejahteraan lain, harus dilakukan secara seimbang sehingga memberikan efek *opportunity cost* yang rendah. Selain untuk mengeliminir ancaman, program-program pertahanan harus dapat juga memberikan *multiplier effect* kepada kesejahteraan masyarakat.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah, kajian terhadap dugaan pengaruh pertahanan terhadap perekonomian dilakukan uji hipotesis dalam penelitian kuantitatif.

6. Implikasi

Terdapat hubungan timbal balik, dimana peningkatan anggaran pertahanan dipengaruhi peningkatan perekonomian, dan peningkatan perekonomian dipengaruhi oleh suasana aman yang ditimbulkan dari fungsi anggaran pertahanan. Maka anggaran pertahanan nasional perlu ditingkatkan.

Tantangan ke depan bagi pertahanan Indonesia adalah kurangnya anggaran pertahanan sedangkan permasalahan pertahanan akan semakin kompleks. Sumber daya alam yang sangat terbatas menyebabkan konflik ke depan akan sangat dipengaruhi oleh motivasi pengendalian sumber-sumber daya tersebut melalui kekuatan militer. Untuk menghadapinya maka peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista harus diperhatikan dengan mengikuti teknologi masa kini. Pengembangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas juga harus terus menerus dilakukan, seperti dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan, dan penyerapan teknologi-teknologi pertahanan yang terbaru. Selain itu sudah saatnya industri pertahanan Indonesia mulai diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan pertahanan nasional.

REFERENSI

- Benoit, E. (1973). *Defence and Economic Growth in Developing Countries*. Lexington.
- Benoit, E. (1978). Growth and Defence in Developing Countries, *Economic Development and Cultural Change*. Vol.26 (2) : 271-280.
- Bonn International Center for Conversion (BICC). (2011). Global Military Index (GMI)", *Occasional Paper*, February 2011.
- Chatterjee, Partha. (1972). The Classical Balance of Power Theory, *Journal of Peace Research*, Vol.9 (1) : 51-61
- Deger, Saadet & Smith, R. (1983). Military Expenditure and Growth in Less Developed Countries, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 27 (2) : 335-353.
- Institute for Strategic International Studies (IISS)
- Hartley, Keith. (2005). Defence Spending and Its Impact on the National Economy: A Review of the Literature and Research Issue, *Centre for Defence Economics*, University of York, online-version.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2016). The Relations of Defense Budget with Investment: Evidence from Indonesia, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2016, 6(S6) 115-119
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2017). Financing Defence: The Influence of Defence Budget to National Economics in Indonesian Case", *Proceeding of International Conference on Management, Accounting, Business and Entrepreneurship (ICMABE-2017)*, IPMI International Business School.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2017). The Level of Traditional Threats of Indonesia's Defense Budget on Natural Balance of Power, *Program Book ICoCSPA September 2017 "Development and Security in Risk Society"*, Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University.
- Lebovick, James H. & Ishaq, Ashfaq. (1987). Military Burden, Security Needs, and Economic Growth in the Middle East, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.31, No.1, pp.106-138.
- Rahakundini, Connie Bakrie. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Virmani, Arvind. (2004). "Economic Performance, Power Potential and Global Governance : Towards a New International Order", *ICRIER Working Paper Series*.
- West, Robert & Thompson, Scott. (1990). Impact of Military Expenditures on Economic Development, Interim Synthesis Report Submitted to the Agency for International Development by the *Fletcher School of Law and Diplomacy*, Tufts University.